

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi dilakukan oleh setiap negara dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan juga kesejahteraan rakyat. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses di mana suatu masyarakat menciptakan suatu lingkungan yang mempengaruhi hasil-hasil pembangunan ekonomi, seperti kenaikan kesempatan kerja dan juga pertumbuhan ekonomi Blakely dalam (Abdoellah & Mulyanto, 2019). Pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang baik, diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang tinggi, juga harus menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Kesempatan kerja bagi penduduk atau masyarakat akan memberikan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Todaro, 2000 dalam (Kuncoro, 2018). Salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam percepatan pembangunan adalah dengan melakukan pembanguanna ekonomi di masing-masing daerah melalui otonomi daerah. Dengan diberikannya kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daersah dengan sektor swasta utuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang

perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat (Susanti, Hanafi, & Adiono, 2013).

Sasaran dari pembangunan ekonomi salah satunya adalah pembangunan kawasan pedesaan. Kawasan pedesaan atau desa merupakan unit terkecil dari negara yang kedudukannya paling dekat dengan masyarakat dan secara langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Desa merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang nyata bagi pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, pendapatan masyarakat guna mengurangi kemiskinan yang merupakan persoalan utama yang dihadapi pemerintah. Sebagai upaya dalam peningkatan pembangunan daerah, terutama pada daerah pedesaan, maka pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali, mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui pembangunan ekonomi lokal.

Pembangunan ekonomi lokal merupakan proses dimana pemerintah lokal atau organisasi berbasis masyarakat (lingkungan) mengelola sumberdaya yang ada dan melakukan kemitraan dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menstimulasi aktivitas ekonomi. Tujuan dari pembangunan ekonomi lokal adalah untuk merangsang kesempatan kerja di sektor-sektor yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggunakan sumber daya manusia, alam, dan kelembagaan lainnya (Blakely 1989).

Menurut data dari Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan perdesaan pada bulan Maret 2019 sebesar 12,85% atau sebanyak 15,15 juta orang. Hal ini berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan perkotaan yaitu sebesar 6,69% atau sebanyak 9,99 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk melakukan pembangunan di daerah pedesaan, karena sebagian besar masyarakat di Indonesia tinggal di kawasan pedesaan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan juga menambah Pendapatan Asli Desa (PAD), pemerintah membentuk Badan usaha Milik Desa (BUMDes).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang dikelola oleh masyarakat desa dan perangkat desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi desa. Pembangunan BUMDES sebagai lokomotif pembangunan desa lebih dilaterbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa. BUMDES berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha yang dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) (Ihsan, 2018).

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengelolaan, pengurusan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa, BUMDes bertujuan pertama meningkatkan perekonomian desa, kedua meningkatkan pendapatan asli desa, ketiga meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan

kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir menjadi tulang punggung pertumbuhan serta pemerataan ekonomi desa.

BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam peningkatan ekonomi desa, berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, dari desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk lembaga atau badan usaha yang dikelola secara profesional, tetapi tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif (Junaidi, 2018).

Merujuk pada buku Panduan BUMDes (2007:6) pendirian BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa yaitu kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar, tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset pergerakan perekonomian masyarakat, adanya unit unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. Beberapa BUMDes yang dikelola desa diantaranya simpan pinjam, pengelolaan pasar desa, pengembangan UMKM, perdagangan hasil pertanian, dan pengembangan desa wisata.

Desa wisata biasanya dikembangkan pada kawasan pedesaan yang didalamnya masih memiliki karakteristik khusus. Karakteristik yang dimiliki pada desa wisata adalah sumber daya alam yang masih asli, keunikan desa, tradisi dan budaya masyarakat lokal. Berbagai karakteristik tersebut menjadi identitas suatu desa wisata yang memiliki kegiatan wisata minat khusus. Selain itu, desa wisata secara tidak langsung dapat mendorong masyarakat lokal untuk menjaga

dan melestarikan alam serta kebudayaan yang telah dimiliki desa tersebut. (Masitah, 2019)

Ari Prasetya (2008) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa perkembangan industri pariwisata mempunyai dampak besar bagi perekonomian suatu wilayah, antar lain pemerataan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dari sektor pajak yang dapat digunakan untuk membangun dan mengembangkan objek-objek tersebut

Pembangunan wilayah pedesaan menjadi salah satu prioritas yang sedang ditangani pemerintah daerah. salah satu daerah yang memprioritaskan pembangunan wilayah pedesaan adalah Kabupaten Nganjuk. Menurut keterangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pemerintah kabupaten nganjuk sedang mengupayakan pembangunan pedesaan dan juga pemberdayaan masyarakat daerah pedesaan melalui dibangunnya BUMDes. Untuk mengembangkan BUMDes yang ada di Kabupaten Nganjuk, pemerintah membuat program Forum Komunikasi Milik Desa Kabupaten Nganjuk, yang didalamnya beranggotakan seluruh ketua BUMDes di Kabupaten Nganjuk. Sementara itu pada tahun 2020 Kabupaten Nganjuk ini memiliki 264 unit BUMDes yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Nganjuk.

Di Kecamatan Ngronggot sendiri pembangunan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sudah dikembangkan, hal ini ditandai dengan berjalannya pelaksanaan BUMDes hampir setiap desa yang ada di Kecamatan Ngronggot.

Tabel 1.1 Kegiatan BUMDes di Kecamatan Ngronggot Tahun 2019

No	Desa	Nama BUMDes	Unit Usaha	Permodalan
1	Cengkok	Cengkok Asri	Wisata Desa, Warung, BNI,	16.016.000
2	Tanjungkalang	Surya Tanjung	Simpan Pinjam, Bibit Lele	10.000.000
3	Juwet	Sri Rejeki	Simpan Pinjam	-
4	Kelutan	Suber Makmur	Persewaan sound system, Kopwan	1.000.000
5	Ngronggot	Joprina	Simpan Pinjam, Kios Desa	75.353.884
6	Mojokendil	Sumber Makmur	Simpan Pinjam	6.375.000
7	Betet	Betet Santoso	Simpan Pinjam, Wisata Tani Betet, BNI46	10.000.000
8	Kaloran	Maju Makmur	Peternakan, Industri Kecil batu bata	8.000.000
9	Banjarsari	Banjar Jaya	-	-
10	Dadapan	Agoeng Sentosa	Simpan Pinjam	5.000.000
11	Trayang	Trayang Sejahtera	Perdagangan	10.000.000
12	Kalianyar	Maju Jaya	Jasa Keuangan, jasa Gudang, Jasa Sumr Dalam, jasa Online	-
13	Klurahan	Handoko Sumelah	Simpan Pinjam, Peternakan	7.500.000

Sumber: Kecamatan Ngronggot 2019

Darii Tabel diatas dapat dilihat bahwa kegiatan unit usaha yang ada di Kecamatan Ngronggot adalah usaha simpan pinjam, pembibitan lele, persewaan sound sistem, kopwan, kios desa, BNI 46, Peternakan, industri kecil batu bata, jasa keuangan, jasa gudang, jasa sumur dalam, jasa online, dan desa wisata. Menurut keterangan dari Ibu Sih Loemintoe yang bertugas dibagian Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Ngronggot, BUMDes yang berkembang dengan pesat adalah BUMDes yang berfokus pada pengelolaan unit usaha wisata desa. Di Kecamatan Ngronggot sendiri memiliki dua BUMDes yang mengelola desa wisata yaitu BUMDes Cengkok Asri, dan BUMDes Betet

Santosa. Berikut merupakan data pengunjung yang ada di kedua desa wisata tersebut.

Tabel 1.2
Jumlah Kunjungan Wisata Desa Di Kecamatan Ngronggot Tahun
2019-2020

No	Nama Wisata	Jumlah Pengunjung	
		2019	2020
1	Wisata Taman Cengkok	72.90	312.250
2	Wisata Tani Betet	90.350	201.100

Sumber: Data Primer (2021)

Dari tabel diatas, dapat dilihat jumlah pengunjung wisata pada dua desa wisata. Dari perbandingan kedua wisata tersebut, dapat dilihat bahwa Taman Wisata Cengkok memiliki pengunjung tertinggi yaitu sebanyak 102.250 pengunjung.

Desa Cengkok memiliki icon yang terkenal dalam bidang desa wisata yaitu Wisata Taman Cengkok yang menjadi salah satu desa wisata cukup terkenal di Kabupaten Nganjuk. Wisata Taman Cengkok sendiri dikelola oleh BUMDes dan juga bekerja sama dengan beberapa kelompok masyarakat seperti PKK, LPM, Karang Taruna, Perangkat pemerintah, dan juga RT dan RW. BUMDes Cengkok Asri berdiri sejak tahun 2016. Pada awalnya usaha yang dikelola oleh BUMDes Cengkok Asri adalah penjualan token listrik, dan simpan pinjam. Namun seiring berjalannya waktu pada pertengahan tahun 2019 setelah terpilihnya Kepala Desa Cengkok yang baru, muncul gagasan untuk membangun dan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat yaitu Wisata Taman Cengkok.

Wisata Taman Cengkok rencananya akan berdiri di atas lahan seluas 5 hektar, namun pembangunannya baru mencapai 2 hektar. Menurut keterangan Kepala Desa Cengkok, untuk saat ini pembangaunan taman wisata cengkok dirasa masih berkisar 45% dari rencana awal. Hal itu dikarenakan kurangnya investor dari pihak swasta sehingga menyebabkan kurang optimalnya dalam pembangunan wisata. Selain itu masih banyaknya masyarakat yang tidak setuju tentang pembangunan wisata tersebut dikarenakan dana pembangunan Desa Wisata berasal dari iuran warga, dan sebagian masyarakat merasa keberatan dengan adanya iuran tersebut.

Sebelum adanya Taman Wisata Cengkok, lahan ini hanya merupakan persawahan yang ditanami oleh tanaman tebu dan tanaman palawija lainnya. Oleh sebab itu pemerintah desa termasuk BUMDes memiliki ide untuk membangun desa wisata. Wisata Taman Cengkok ini pada mulanya dibangun dengan dana desa, dan juga swasembada dari masyarakat setempat yang dikumpulkan di RW masing-masing, dan dibangun dengan gotong royong bersama masyarakat Desa Cengkok sendiri. Di Wisata Taman Cengkok sendiri terdapat berbagai wahana yaitu kolam renang, kolam pemancingan, skuter mini dan juga permainan anak, wahana jembatan cinta, dan taman yang dilengkapi dengan spot foto yang menarik. Selain itu juga dilengkapi dengan fasilitas seperti mushola, toilet dan juga kios warung makan dan juga pedagang lainnya. Menurut keterangan salah satu pengurus BUMDes Cengkok Asri sebenarnya masih kurang fasilitas dan juga wahana yang ada di Taman Cengkok, selain itu tersedianya kios untuk para pedagang dan warga yang ingin berjualan di Taman Wisata Cengkok juga masih kurang, dan masih belum adanya investor yang masuk untuk memberikan investasinya. Selain itu masih kurang tersedianya kios

untuk para pedagang dan warga yang ingin berjualan di Taman Wisata Cengklok. Padahal dengan banyaknya kios dan tempat untuk berdagang diharapkan juga dapat menambah pemasukan dari masyarakat sekitar dan juga dapat menambah lapangan pekerjaan. Hal itu sejalan dengan tujuan dibangunnya BUMDes yaitu untuk menambah PAD dan juga menambah pendapatan masyarakat sekitar.

Tujuan awal pembentukan BUMDes yaitu untuk mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan untuk mendorong pengembangan dan kemampuan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan, serta untuk mendorong sektor informal untuk dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat. BUMDes didirikan dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azizah & Syafitri, 2017).

Menurut penelitian dari Nurhajati (2018) pembangunan pariwisata yang dilakukan berdampak pada aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat, dampak tersebut berupa dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak yang terjadi akibat pembangunan pariwisata pada aspek ekonomi diantaranya yaitu terbukanya lapangan kerja baru, berkurangnya tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat, membantu menanggung beban pembangunan sarana dan prasarana setempat, peningkatan pendapatan yang sangat tinggi tetapi hanya musiman. Dampak pembangunan pariwisata pada aspek sosial budaya diantaranya: perlindungan dan pelestarian budaya serta adat istiadat, meningkatnya tingkat pendidikan, meningkatnya ketrampilan.

Menurut penelitian Hermawan (2016) diketahui bahwa pengembangan desa wisata di Nglanggeran cenderung membawa dampak positif bagi perkembangan ekonomi lokal. Untuk itu pengembangan desa wisata dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal hendaknya

tetap dijalankan secara berkelanjutan. Selain pembangunan bersifat fisik, pemberdayaan masyarakat lokal juga harus selalu digiatkan demi terciptanya masyarakat wisata yang kompeten dan mandiri secara ekonomi, serta siap mengoptimalkan peluang-peluang ekonomi yang muncul dari kegiatan desa wisata.

Pengembangan dan pembangunan Di Desa Wisata Cengkok masih kurang optimal dikarenakan masih 2 hektar pembangunannya, dimana rencana awal akan dibangun seluas 5 hektar. Selain itu masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki kios untuk tempat berjualan. Dimana desa wisata yang dikelola oleh BUMDes masih cukup kecil dan masih memerlukan pengembangan lainnya. Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan Potensi Wisata Di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diketahui bahwa rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Peran Badan Usaha Milik Desa Dalam Pengembangan Potensi Wisata Di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran BUMDes dalam pengembangan potensu wisata di Desa Cengkok, Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memahami kajian ilmu ekonomi terutama yang berhubungan dengan peran BUMDes dalam pengembangan potensi wisata. Dimana kita tahu bahwa BUMDes merupakan salah satu penggerak perekonomian masyarakat di daerah pedesaan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Pemerintah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pemerintah untuk melakukan kebijakan dan terus maju mengawasi jalannya BUMDes di beberapa desa. kebijakan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan dapat mengembangkan pembangunan pedesaan.

b) Bagi Mahasiswa

Dapat digunakan untuk mengetahui peranan BUMDes dalam pengembangan potensi wisata di suatu daerah. Selain itu dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

c) Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap peranan BUMDes dalam pengembangan potensi wisata di Desa Cengkok.